

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT MARET 2026

**VOLUME 10,
2026**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**



**PERKEMBANGAN
TINGKAT KEMISKINAN
PROVINSI JAWA BARAT
MARET 2026**

VOLUME 10, 2026



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT***

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT MARET 2026

Volume 10, 2026

ISSN : 2654-6841
No. Publikasi : 32000.26033
Katalog : 3205011.32

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 57 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Sumber Ilustrasi:

canva.com, unsplash.com

"Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat."

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT MARET 2026

Volume 10, 2026

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Margaretha Ari Anggorowati
Penanggung Jawab	: Isti Larasati Widiastuty
Penulis dan Pengolah Data	: Charisma Pratiwi Anwar Muhammad Nurul Alam Hasyim
Pemeriksa Tabel	: Renie Wulandari Raifa Mukti
Pembuat Infografis	: Hartato
Pembuat Kover	: Charisma Pratiwi Anwar
Penyunting	: Isti Larasati Widiastuty Yayat Hidayat
Penata Letak	: Muhammad Nurul Alam Hasyim

KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk keperluan perencanaan, *monitoring* dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan khususnya di Jawa Barat, diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin.

Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun melalui Berita Resmi Statistik (BRS). Rilis BRS dilaksanakan setiap bulan Juli untuk potret kemiskinan bulan Maret dan pada bulan Januari untuk potret kemiskinan bulan September. Melengkapi ulasan yang disajikan pada BRS, BPS Provinsi Jawa Barat menyusun publikasi ini untuk mengupas lebih dalam data kemiskinan di Jawa Barat yang disajikan dalam bentuk publikasi “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2026”.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi terkini dan memberikan manfaat yang luas.

Bandung, September 2026

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat,**

Margaretha Ari Anggorowati

DAFTAR ISI

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

MARET 2026

Volume 10, 2026

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Penulisan	5
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT	7
2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2025–Maret 2026.	9
2.2. Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan	10
2.3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan secara Nasional	12
BAB III. GARIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT	15
3.1. Perubahan Garis Kemiskinan, Maret 2025–Maret 2026	17
3.2. Peranan Komoditi terhadap Garis Kemiskinan, Maret 2026	18
BAB IV. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	23
4.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	25

4.2.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	27
BAB V. TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN		29
5.1.	Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, Maret 2025–Maret 2026.....	31
5.2.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, Maret 2025–Maret 2026.....	33
BAB VI. PENUTUP		37
DAFTAR PUSTAKA.....		41
CATATAN TEKNIS.....		43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026	10
Tabel 2. Sumbangan Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2026.....	21

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia, Maret 2026.....	13
Gambar 2. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026	18
Gambar 3. Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan dan Nonmakanan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2026.....	19
Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026	26
Gambar 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026	28
Gambar 6. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026.....	32
Gambar 7. Persentase Pengeluaran Penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah (Persen), Maret 2025–Maret 2026.....	34
Gambar 8. <i>Gini Ratio</i> menurut Kurva Lorenz.....	55

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

- Isu kemiskinan menjadi perhatian seluruh negara sehingga kemiskinan menjadi tujuan utama dalam 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

UKURAN KEMISKINAN

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*)

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur menurut garis kemiskinan

SUMBER DATA

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025–Maret 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di setiap negara. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan pertama dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang kemudian akan mendasari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi, dan lain-lain.

Dalam RPJMN 2025–2029 strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen pada tahun 2029. Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024–2026, target persentase penduduk miskin Jawa Barat di tahun 2025 sebesar 7,24 persen. Kemudian pada tahun 2026 persentase penduduk miskin Jawa Barat ditargetkan mencapai 7,10 persen.

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat turut berkomitmen mengatasi berbagai persoalan yang ada demi tercapainya target SDGs. Terutama masalah kemiskinan yang menjadi prioritas utama. Tersedianya data kemiskinan yang akurat diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan

kemiskinan, dan pada akhirnya mampu mewujudkan Jawa Barat tanpa kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan mencakup periode 1976–1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak saat itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian baru sejak tahun 2002, BPS dapat menyajikan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin setiap tahun.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan dan nonmakanan). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Apalagi untuk ekonomi Jawa Barat yang sempat mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 maupun *shock* lainnya, yang tentunya berdampak pada kesejahteraan penduduk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Haughton dan Khandker (2010), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin,
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat,
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin,
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2026” disusun dengan tujuan mendukung penyediaan data kemiskinan. Publikasi ini menyajikan data perkembangan tingkat kemiskinan, perubahan Garis Kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Jawa Barat. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dapat terus dipantau dari waktu ke waktu.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan di Jawa Barat menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret 2025–Maret

2026. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS menyelenggarakan Susenas sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu periode bulan Maret dan bulan September.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari publikasi ini adalah sebagai berikut:

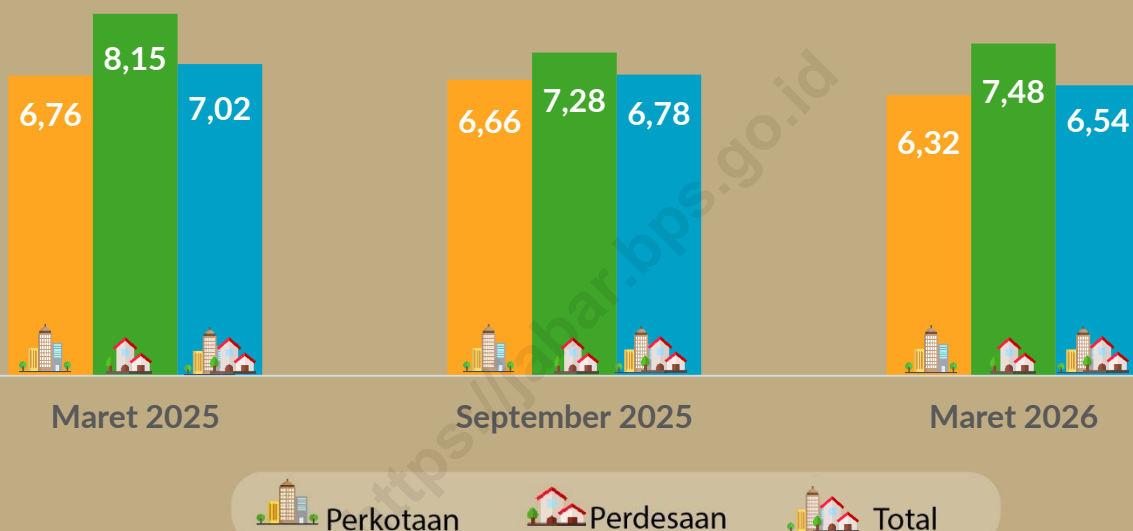
- Bab I** menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.
- Bab II** menjelaskan tentang perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat bulan Maret 2025–Maret 2026.
- Bab III** membahas tentang perubahan Garis Kemiskinan bulan Maret 2025–Maret 2026.
- Bab IV** membahas tentang Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2).
- Bab V** menjelaskan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Jawa Barat bulan Maret 2025–Maret 2026.
- Bab VI** menjelaskan penutup berupa kesimpulan.

Selain itu, pada bagian lampiran disajikan catatan teknis terkait metode penghitungan kemiskinan dan ketimpangan.

BAB 2

KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN JAWA BARAT MENURUT TIPE DAERAH TEMPAT TINGGAL. MARET 2025–MARET 2026



Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi. Selama periode Maret 2025–Maret 2026, tingkat kemiskinan di daerah **perkotaan** menurun 0,44 persen poin menjadi **6,32 persen pada Maret 2026**. Sama halnya terjadi di daerah perdesaan, tingkat kemiskinannya turun 0,67 persen poin menjadi **7,48 persen pada Maret 2026**.

BAB II

KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2025- Maret 2026

Seperti disampaikan pada bagian terdahulu, setiap tahun BPS memotret tingkat kemiskinan sebanyak dua kali, yaitu Maret dan September. Selama periode Maret 2025–Maret 2026 terdapat tiga titik waktu pengamatan yaitu Maret 2025, September 2025 dan Maret 2026. Dari tiga titik waktu pengamatan tersebut, tingkat kemiskinan Jawa Barat konsisten menunjukkan penurunan. Dari 7,02 persen pada Maret 2025 menjadi 6,54 persen pada Maret 2026.

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, selama periode Maret 2025–Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 144,84 ribu orang. Hal yang sama terjadi di perdesaan yang mengalami penurunan sebesar 73,43 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,76 persen pada Maret 2025 menjadi 6,32 persen pada Maret 2026. Sementara itu, di perdesaan turun dari 8,15 persen pada Maret 2025 menjadi 7,48 persen pada Maret 2026.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2025	2,85	6,76
September 2025	2,83	6,66
Maret 2026	2,70	6,32
Perdesaan		
Maret 2025	0,81	8,15
September 2025	0,72	7,28
Maret 2026	0,73	7,48
Perkotaan + Perdesaan		
Maret 2025	3,65	7,02
September 2025	3,55	6,78
Maret 2026	3,44	6,54

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025-Maret 2026

2.2. Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Berbagai penelitian terdahulu seperti disampaikan Haughton dan Khandker (2012) menyatakan berbagai hal yang disinyalir sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan, di antaranya adalah:

1. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintahan, serta hak milik dan pelaksanaannya.
2. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan pasar, dan hubungan sosial.

3. Karakteristik rumah tangga dan individu, di antaranya yang paling penting adalah:
 - a. Demografis, seperti jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan jenis kelamin kepala rumah tangga.
 - b. Ekonomi, seperti status pekerjaan, jam kerja dan harta benda yang dimiliki, serta
 - c. Sosial, seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal.

Potret tingkat kemiskinan berdasarkan hasil Susenas Maret 2026 berkaitan erat dengan pola aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, perubahan harga (inflasi) dan tingkat pengangguran yang cenderung dinamis. Perubahan berbagai indikator makro di Jawa Barat, turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Beberapa indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Maret 2026 di Jawa Barat di antaranya adalah:

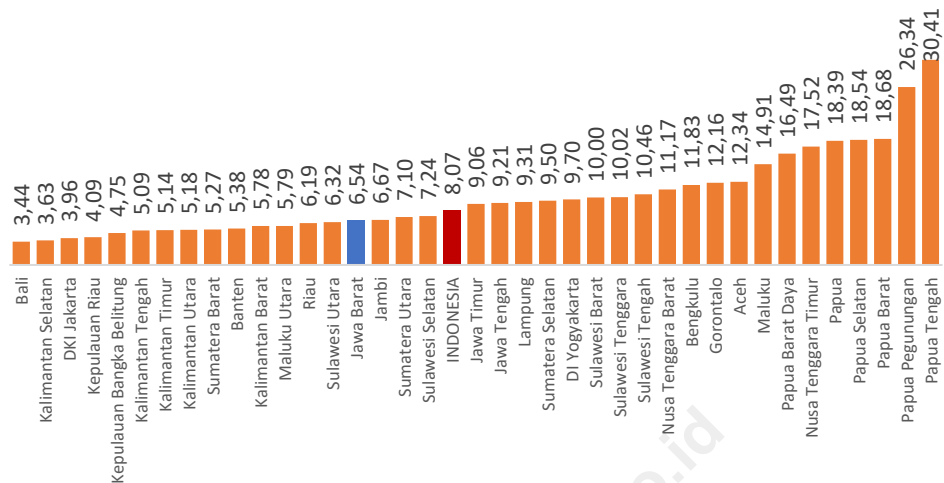
1. Ekonomi Jawa Barat Triwulan I 2026 tumbuh 5,80 persen (*y-on-y*), lebih cepat jika dibandingkan dengan Triwulan III 2025 yang tumbuh 5,19 persen (*y-on-y*) dan Triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 5,00 persen (*y-on-y*).
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026 sebesar Rp523,48 triliun meningkat 6,01 persen dibandingkan Triwulan III 2025 yang sebesar Rp493,82 triliun.
3. Selama September 2025 – Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 1,76 persen.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 6,64 persen, menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 6,77 persen.

5. Luas panen padi periode Februari 2026 dibandingkan September 2025 mengalami penurunan sebesar 20,79 persen (dari 124,31 ribu hektar menjadi 98,47 ribu hektar) dan produksi padi menurun sebesar 24,28 persen (dari 0,90 juta ton menjadi 0,68 juta ton).

Berdasarkan faktor-faktor di atas, terlihat bahwa Ekonomi Jawa Barat Triwulan I 2026 tumbuh lebih cepat dibandingkan Triwulan III 2025 maupun Triwulan I 2025. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2025. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan daya beli masyarakat Jawa Barat pada periode tersebut.

2.3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Secara Nasional

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, maka tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat masih lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,07 persen pada Maret 2026. Posisi relatif angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada Maret 2026 berada pada posisi ke-15 terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Persentase penduduk miskin yang terendah di Indonesia ditempati Provinsi Bali dengan angka 3,44 persen dan yang tertinggi yaitu Provinsi Papua Tengah dengan tingkat kemiskinan sebesar 30,41 persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga terendah setelah DKI Jakarta dan Banten. Gambar 1 menunjukkan masih adanya disparitas tingkat kemiskinan di Indonesia. Disparitas kemiskinan antar provinsi di Indonesia ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi. Masalah keterpencilan wilayah dan akses terhadap sumber daya dimungkinkan menjadi salah satu faktornya.



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2026

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Maret 2026

BAB 3

GARIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

PERKEMBANGAN GARIS KEMISKINAN JAWA BARAT (RUPIAH PER KAPITA PER BULAN) MENURUT TIPE DAERAH TEMPAT TINGGAL, MARET 2025–MARET 2026

547.752



Perkotaan



Perdesaan

550.729 535.726

MARET 2025

575.499



Perkotaan



Perdesaan

578.501 563.380

SEPTEMBER 2025

609.790



Perkotaan



Perdesaan

614.642 590.122

MARET 2026



Selama periode Maret 2025–Maret 2026, Garis Kemiskinan Jawa Barat naik sebesar **11,33 persen** dari Rp547.752 menjadi Rp609.790 per kapita per bulan



Garis Kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan **11,61 persen** pada periode Maret 2025–Maret 2026 dan Garis Kemiskinan di perdesaan juga naik sebesar **10,15 persen**



BAB III

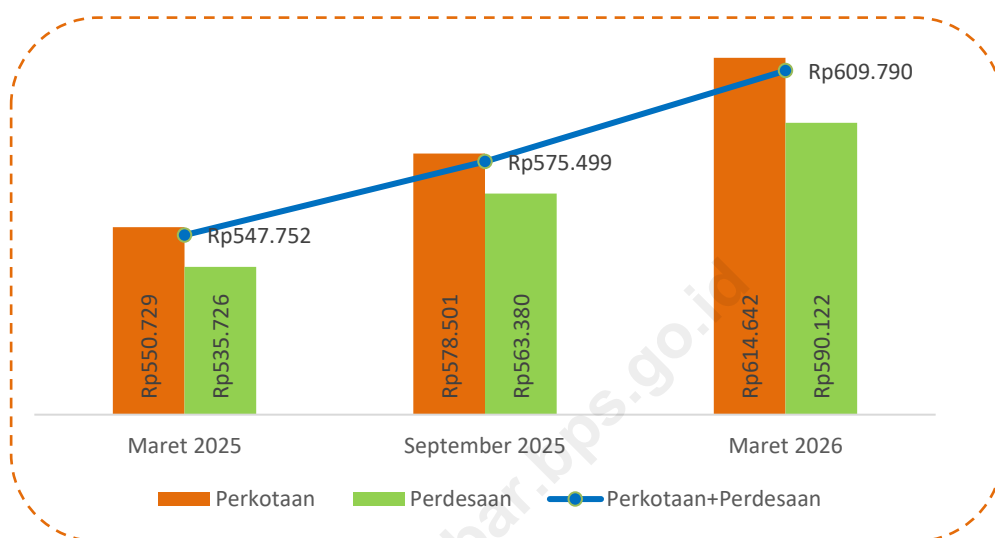
GARIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

3.1. Perubahan Garis Kemiskinan, Maret 2025–Maret 2026

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok minimum nonmakanan. GK digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Seseorang dikatakan penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya lebih rendah dari GK. GK dihasilkan dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Selama kurun waktu Maret 2025–Maret 2026, Garis Kemiskinan naik sebesar 11,33 persen dari Rp547.752 per kapita per bulan pada Maret 2025 menjadi Rp609.790 per kapita per bulan pada Maret 2026. Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, Garis Kemiskinan perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu sebesar 11,61 persen. Yaitu dari Rp550.729 per kapita per bulan

pada Maret 2025 menjadi Rp614.642 per kapita per bulan pada Maret 2026. Sedangkan Garis Kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan sebesar 10,15 persen dari Rp535.726 per kapita per bulan di Maret 2025 menjadi Rp590.122 per kapita per bulan pada Maret 2026 (Gambar 2).



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025–Maret 2026

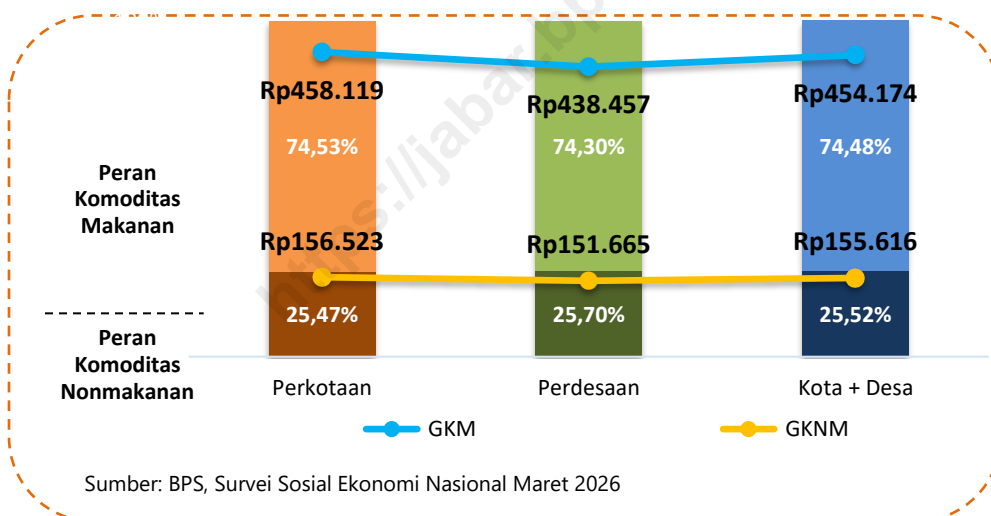
Gambar 2. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026

3.2. Peranan Komoditi terhadap Garis Kemiskinan, Maret 2026

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada Maret 2026, GKM Jawa Barat mencapai Rp454.174 per kapita per bulan dan GKNM sebesar Rp155.616 per kapita per bulan. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, GKM di perkotaan lebih tinggi dibandingkan GKM di perdesaan yaitu Rp458.119 per kapita per bulan dibandingkan Rp438.457 per kapita per bulan. Begitu pun

dengan GKNM di perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang di perdesaan yaitu mencapai Rp156.523 per kapita per bulan di perkotaan sedangkan di perdesaan mencapai Rp151.665 per kapita per bulan (Gambar 3).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sangat dominan dibandingkan peran komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Sumbangan GKM terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 74,53 persen di perkotaan dan 74,30 persen di perdesaan. Secara total peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,48 persen.



Gambar 3. Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan dan Nonmakanan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2026

Tabel 2 memperlihatkan komoditi yang memberikan sumbangan terbesar pada GK. Jika dilihat, komoditi yang menjadi penyumbang terbesar

GK pada Maret 2026, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan adalah beras. Di perkotaan, beras menyumbang 21,33 persen terhadap GK sedangkan di perdesaan bisa mencapai 26,78 persen. Besarnya sumbangan beras dalam GK dikarenakan beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk khususnya masyarakat miskin. Oleh karena itu, peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat menjadi penting.

Posisi kedua terbesar sebagai penyumbang GK adalah rokok kretek filter. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika memperhatikan makanan adalah sesuatu yang menghasilkan kalori, rokok kretek tidak termasuk dalam hal ini. Namun karena rokok kretek banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin sehingga tetap dimasukkan dalam penghitungan Garis Kemiskinan. Komoditi rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 10,63 persen untuk daerah perkotaan dan 6,88 persen di perdesaan.

Selanjutnya komoditi urutan ketiga sampai kelima sebagai penyumbang terbesar untuk GK di perkotaan adalah telur ayam ras (5,74 persen), daging ayam ras (4,92 persen), serta kopi bubuk dan kopi instan (4,03 persen). Sedangkan di perdesaan, kopi bubuk dan kopi instan (4,76 persen), telur ayam ras (4,53 persen), dan daging ayam ras (4,03 persen).

Tabel 2. Sumbangan Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah (Persen), Maret 2026

Komoditi	Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	74,53	Makanan	74,30
Beras	21,33	Beras	26,78
Rokok kretek filter	10,63	Rokok kretek filter	6,88
Telur ayam ras	5,74	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	4,76
Daging ayam ras	4,92	Telur ayam ras	4,53
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	4,03	Daging ayam ras	4,03
Mie instan	3,04	Roti	2,89
Roti	2,75	Mie instan	2,84
Kue kering/biskuit	2,39	Kue kering/biskuit	2,03
Tahu	1,85	Tahu	1,69
Kue basah	1,77	Cabe rawit	1,59
Tempe	1,66	Bawang merah	1,55
Bawang merah	1,52	Tempe	1,52
Cabe rawit	1,32	Kue basah	1,51
Gula pasir	0,98	Mujair	1,04
Cabe merah	0,86	Tepung terigu	0,83
Lainnya	9,73	Lainnya	9,84
Nonmakanan	25,47	Nonmakanan	25,70
Perumahan	10,01	Perumahan	11,12
Listrik	2,39	Bensin	2,40
Bensin	2,36	Listrik	1,54
Pendidikan	1,63	Perlengkapan mandi	1,29
Perlengkapan mandi	1,23	Pendidikan	1,08
Kesehatan	0,88	Sabun cuci	0,86
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,71	Kesehatan	0,80
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,71	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,77
Angkutan	0,69	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,76
Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,64	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,61
Lainnya	4,21	Lainnya	4,47

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2026

Untuk komoditi nonmakanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 10,01 persen, listrik sebesar 2,39 persen, bensin sebesar 2,36 persen, pendidikan sebesar 1,63 persen dan perlengkapan mandi sebesar 1,23 persen. Sedangkan lima komoditi nonmakanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perdesaan secara berturut-turut adalah perumahan sebesar 11,12 persen, bensin sebesar 2,40 persen, listrik sebesar 1,54 persen, perlengkapan mandi sebesar 1,29 persen dan pendidikan sebesar 1,08 persen.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB 4

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN



INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN JAWA BARAT. MARET 2026

- ✓ Pada periode September 2025–Maret 2026, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan.
- ✓ Indeks Kedalaman Kemiskinan turun 0,10 menjadi 1,04 dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun 0,04 menjadi 0,23 pada Maret 2026.
- ✓ Penurunan nilai P_1 , mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.
- ✓ Penurunan nilai P_2 , mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antarpenguduk miskin cenderung semakin menyempit.

BAB IV

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

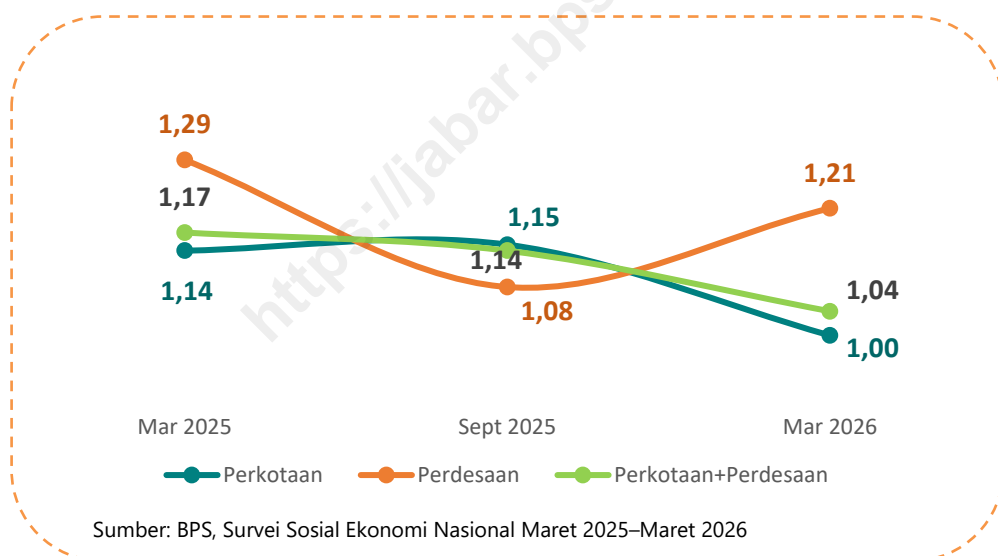
4.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan yaitu tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai P_1 ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai P_1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai P_1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati Garis Kemiskinan.

Adapun Indeks Keparahatan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P_2 maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2025–September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Jawa Barat menunjukkan penurunan. P_1 Maret 2025 mengalami penurunan dari 1,17 menjadi 1,14 pada September 2025. Jika dilihat menurut wilayah, P_1 di perdesaan mengalami penurunan, yaitu dari 1,29 pada Maret 2025 menjadi 1,08 pada September 2025. Sedangkan di wilayah perkotaan, P_1 naik tipis dari 1,14 menjadi 1,15 pada September 2025 (Gambar 4).



Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026

Selanjutnya, jika dilihat selama periode September 2025–Maret 2026, maka dapat kita lihat bahwa P_1 September 2025 mengalami penurunan dari 1,14 menjadi 1,04 pada Maret 2026. Penurunan nilai indeks ini

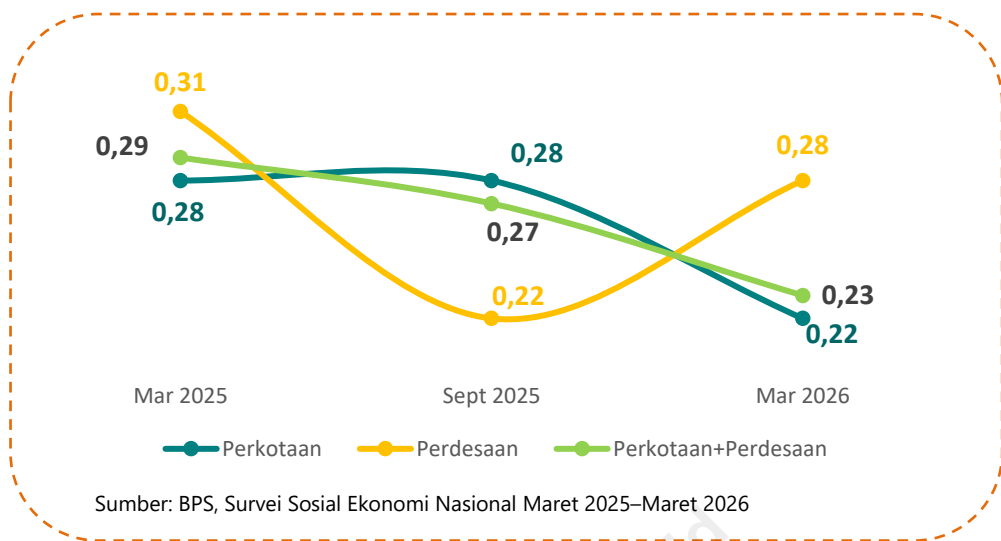
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan. Penurunan P_1 terjadi di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan P_1 turun dari 1,15 pada September 2025 menjadi 1,00 pada Maret 2026. Sementara itu, di perdesaan, P_1 naik dari 1,08 menjadi 1,21 pada Maret 2026.

Pada Maret 2026, dapat kita lihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan yang di perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih mendekati Garis Kemiskinannya dibandingkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin di perdesaan terhadap Garis Kemiskinannya.

4.2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Hasil Susenas Maret 2026, menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 0,23. Selama periode September 2025–Maret 2026, nilai P_2 Jawa Barat mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin cenderung semakin menyempit.

Jika kita lihat berdasarkan wilayah, nilai P_2 untuk wilayah perdesaan mengalami penurunan dari 0,31 pada Maret 2025 menjadi 0,22 pada September 2025. Sedangkan di wilayah perkotaan nilai P_2 tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 0,28 pada Maret 2025 dan pada September 2025.



Gambar 5. Indeks Keparahatan Kemiskinan (P_2) Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026

Pada periode September 2025–Maret 2026, nilai P_2 Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dari 0,27 menjadi 0,23. Pada kurun waktu yang sama, P_2 di wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,06 poin dari 0,28 pada September 2025 menjadi 0,22 pada Maret 2026. Namun, di wilayah perdesaan, P_2 mengalami kenaikan dari 0,22 pada September 2025 menjadi 0,28 pada Maret 2026.

Pada Maret 2026, dapat kita lihat bahwa Indeks Keparahatan Kemiskinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan yang di perdesaan. Hal ini menunjukkan kesenjangan antarpenduduk miskin perdesaan lebih parah dibandingkan dengan kesenjangan antarpenduduk miskin di perkotaan.

BAB 5

TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN

GINI RATIO

MARET 2026

0,413



“Tingkat Ketimpangan Pengeluaran di Jawa Barat
Tergolong Sedang pada Maret 2026”

0

***Gini Ratio* = 0**, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan lainnya

1

***Gini Ratio* = 1**, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja

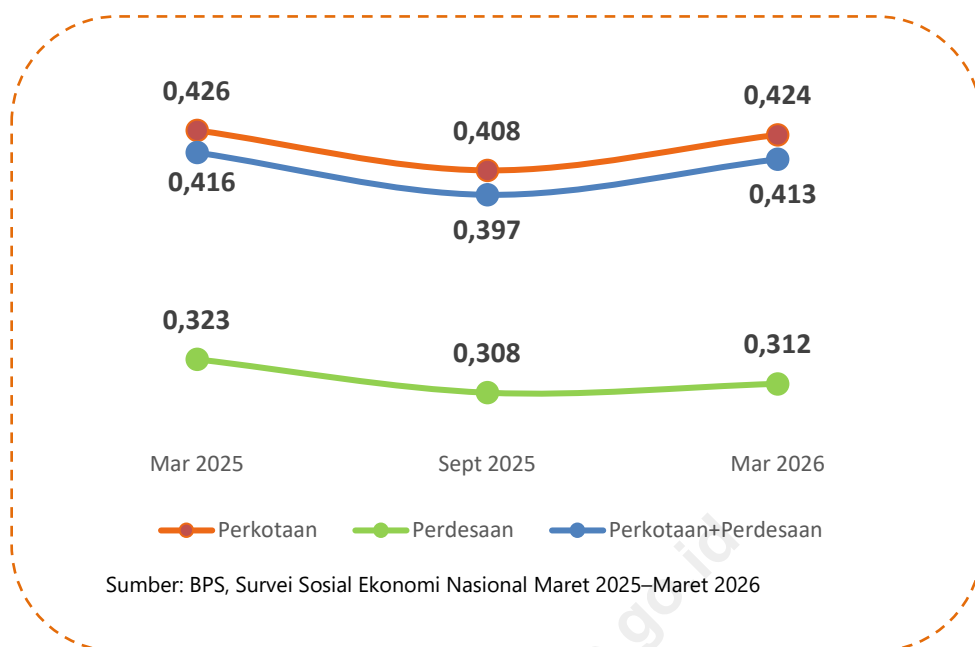
BAB V

TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN

5.1. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, Maret 2025–Maret 2026

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Distribusi pendapatan yang timpang dapat memperburuk pembangunan ekonomi jika perencanaan pendapatan tidak dilakukan secara tepat dan menyeluruh.

Aspek yang perlu menjadi perhatian mengenai kemiskinan selanjutnya adalah distribusi pendapatan penduduk. Karena data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan *Gini Ratio*. *Gini Ratio* adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai *Gini Ratio* ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* maka semakin tinggi pula ketimpangannya.



Gambar 6. Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, Maret 2025–Maret 2026

Secara umum perkembangan nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat periode Maret 2025–Maret 2026 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada Maret 2025 dan September 2025, *Gini Ratio* mengalami penurunan dari 0,416 menjadi 0,397. Namun, pada Maret 2026, *Gini Ratio* di Provinsi Jawa Barat kembali meningkat menjadi 0,413. Kenaikan nilai *Gini Ratio* dari September 2025 ke Maret 2026 menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Jawa Barat semakin melebar.

Berdasarkan tipe daerah, dalam kurun waktu yang sama, *Gini Ratio* di wilayah perkotaan mengalami penurunan pada September 2025, namun mengalami kenaikan pada Maret 2026. Pada Maret 2025, *Gini Ratio* di perkotaan sebesar 0,426, kemudian turun menjadi 0,408 pada September

2025, namun naik menjadi 0,424 pada Maret 2026. Sementara itu, *Gini Ratio* di perdesaan pada Maret 2025 adalah sebesar 0,323, kemudian mengalami penurunan pada September 2025 menjadi 0,308, namun naik menjadi 0,312 pada Maret 2026.

Ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan *Gini Ratio* di Jawa Barat ini termasuk pada kategori ketimpangan sedang, baik di perkotaan, perdesaan maupun keseluruhan.

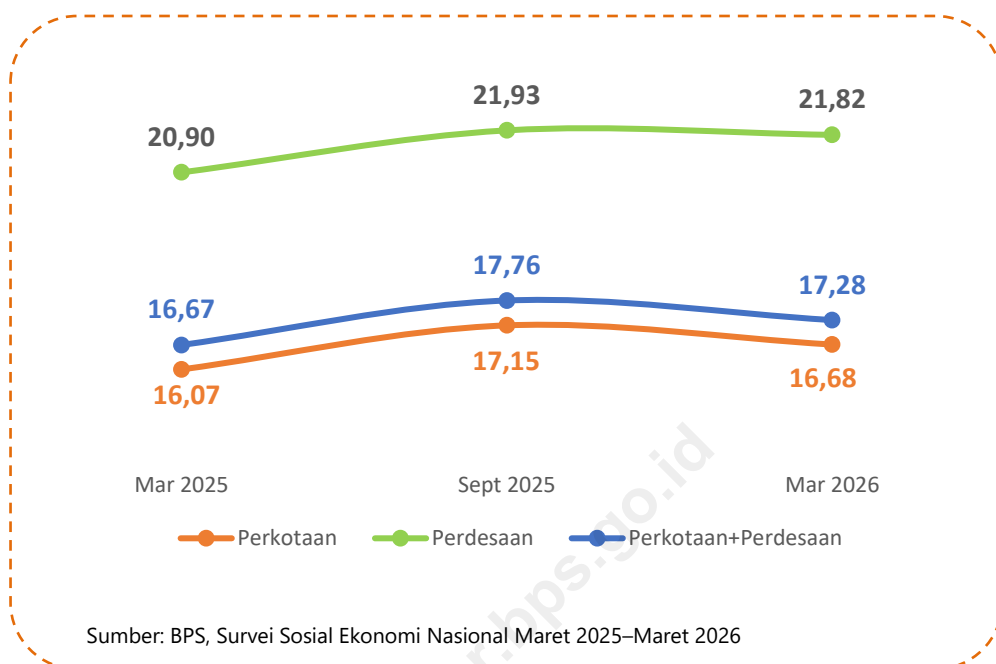
5.2 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, Maret 2025–Maret 2026

Selain menggunakan *Gini Ratio*, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan (didekati dengan pengeluaran) adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah nilainya di bawah 12 persen,
2. Ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen,
3. Ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2026, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat adalah sebesar 17,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tersebut turun dibandingkan dengan September 2025, dan

naik dibandingkan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 17,76 persen dan 16,67 persen.



Gambar 7. Persentase Pengeluaran Penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah (Persen), Maret 2025–Maret 2026

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama, yaitu ketimpangan di daerah perdesaan selalu menunjukan kondisi yang lebih merata dibandingkan di daerah perkotaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan Jawa Barat pada Maret 2026 adalah 16,68 persen, turun 0,47 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2025. Sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2026 sebesar

21,82 persen, turun 0,11 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2025. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia di daerah perkotaan termasuk ke dalam ketimpangan sedang, sedangkan di daerah perdesaan pada Maret 2026 sudah termasuk ke dalam ketimpangan rendah.

<https://jabar.bps.go.id>

KESIMPULAN



Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat masih tergolong cukup tinggi



Garis kemiskinan Jawa Barat pada Maret 2025-Maret 2026 naik sebesar 11,33 persen menjadi Rp609.790 per kapita per bulan



Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan



Tingkat ketimpangan pengeluaran (versi Bank Dunia) di Jawa Barat tergolong rendah pada Maret 2026



BAB VI

PENUTUP

Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat sebesar 3,44 juta jiwa (6,54 persen). Jumlah ini menurun sebesar 0,24 persen poin jika dibandingkan keadaan September 2025 dan turun sebesar 0,48 persen poin jika dibandingkan keadaan Maret 2025.

Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat pada Maret 2026 sebesar Rp609.790 per kapita per bulan. Angka ini mengalami perubahan sebesar 5,96 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2025. Pada Maret 2026, peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih mendominasi dibandingkan komoditi nonmakanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2026 mencapai 74,48 persen.

Pada Maret 2026, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Jawa Barat mencapai angka 1,04, menurun jika dibandingkan kondisi September 2025 dan Maret 2025. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2026 cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Demikian halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), pada Maret 2026 mencapai angka 0,23, menurun jika dibandingkan September 2025 dan Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin di Jawa Barat juga cenderung menyempit.

Pada Maret 2026, nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat naik menjadi 0,413 dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,397. Sementara itu, kesenjangan berdasarkan kriteria Bank Dunia juga mengalami kenaikan. Pada Maret 2026, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat sebesar 17,28 persen, mengalami penurunan dibandingkan September 2025 yang sebesar 17,76 persen.

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2026. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2026 No. 80/08/Th.XXIX, 5 Agustus 2026. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2026. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Jawa Barat Maret 2026 No. 52/08/32/Th.XXVIII, 5 Agustus 2026. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. 2026. Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Barat Maret 2026 No. 53/08/32/Th.XXVIII, 5 Agustus 2026. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. 2026. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Jawa Barat September 2025 No. 14/02/32/Th.XXVIII, 5 Februari 2026. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. 2026. Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Barat September 2025 No. 15/02/32/Th.XXVIII, 5 Februari 2026. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. 2025. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Jawa Barat Maret 2025 No. 43/07/32/Th.XXVII, 25 Juli 2025. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. 2025. Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Barat Maret 2025 No. 44/07/32/Th.XXVII, 25 Juli 2025. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. 2025. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat, September 2025. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- BPS, Bappenas dan UNDP. 2001. *Laporan Pembangunan Manusia 2001: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta: BPS. Bappenas. UNDP.]
- Houghton & Khandker. 2010. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC. Halaman 181.
- _____. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suyanto, Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan: Problem & Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington, DC: World Bank.

<https://jabar.bps.go.id>



CATATAN TEKNIS



CATATAN TEKNIS

1. Literatur Kemiskinan

- ❖ Berdasarkan asal penyebab, kemiskinan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
 - **Kemiskinan kultural** adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.
 - **Kemiskinan struktural** adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".
- ❖ Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, di mana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian **kemiskinan relatif** merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian **kemiskinan secara absolut** merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang

diperlukan, baik makanan maupun nonmakanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai Garis Kemiskinan.

- ❖ Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran **kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.**
- ❖ Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Garis Kemiskinan. Pembentukan Garis Kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum.

1.1. Terminologi Kemiskinan Lainnya

- ❖ Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di

dalam masyarakat. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

- ❖ Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan sosial budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.
- ❖ Kemiskinan menurut *World Bank* (2000) didefinisikan sebagai, “*poverty is pronounced deprivation in well-being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.
- ❖ *United Nations Development Program* (UNDP) di tahun 2001 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan.

- ❖ Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

2. Metode Penghitungan kemiskinan

2.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok nonmakanan.

2.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan dapat ditulis secara matematis sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

2.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk

komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM^*_{jp} : Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilo kalori) provinsi p

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya untuk memperoleh GKM tersebut dilakukan penyetaraan harga 2.100 kilo kalori dengan cara mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sebagai berikut:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

$\overline{HK}_{jp}$: Harga rata – rata kalori di daerah j di provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2.100$$

GKM : Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2.100 kilo kalori/kapita/hari

j : Daerah (perkotaan/perdesaan)

p : Provinsi p

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum nonmakanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{jkp} \cdot V_{jkp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum nonmakanan atau Garis Kemiskinan nonmakanan daerah j dan provinsi p

- V_{jkp} : Nilai pengeluaran per komoditi/subkelompok nonmakanan daerah j dan provinsi p
- r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/subkelompok nonmakanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j
- k : Jenis komoditi nonmakanan terpilih
- j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)
- p : Provinsi ke- p

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

$\%PM_p$: Persentase penduduk miskin di provinsi p

PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p : Jumlah penduduk provinsi p

2.5. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan.

3. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P₂) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α : 0, 1, 2

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (i=1,2,...,q), y_i < z

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan

n : Jumlah penduduk.

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P₀), jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P₁) dan jika $\alpha = 2$ disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P₂).

3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

3.1 *Gini Ratio* (Koefisien Gini)

Gini Ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus *Gini Ratio* adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - x_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

G : *Gini Ratio* (Koefisien Gini)

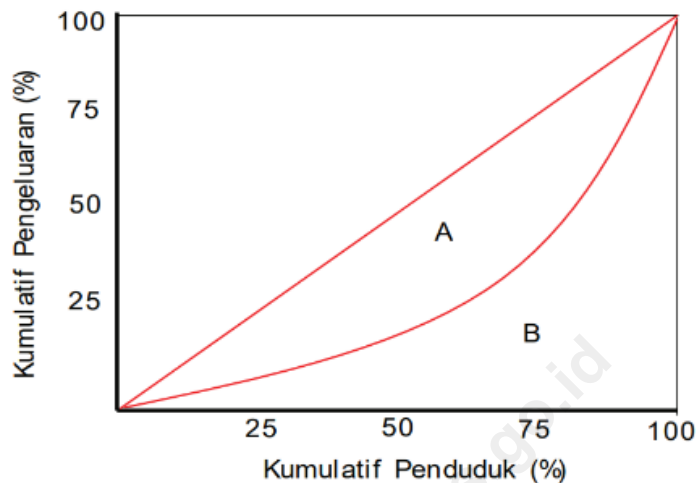
X_k : Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $X_0 = 0$
dan $X_1 = 1$

Y_k : Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $Y_0 = 0$
dan $Y_1 = 1$

Nilai *Gini Ratio* ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai *Gini Ratio* adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz (Gambar 8), yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk *Gini Ratio*, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. *Gini Ratio* didefinisikan sebagai $A/(A+B)$,

dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ *Gini Ratio* bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ *Gini Ratio* akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.



Gambar 8. *Gini Ratio* Menurut Kurva Lorenz

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. *Gini Ratio* memenuhi syarat ini.
2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). *Gini Ratio* juga memenuhi syarat ini.
3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. *Gini Ratio* juga memenuhi hal ini.

4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. *Gini Ratio* juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

1. Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. *Gini Ratio* tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antarkelompok. Yakni nilai total *Gini Ratio* dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai *Gini Ratio* dari subkelompok masyarakat (subgrup).

2. Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antarwaktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

3.2. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
3. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustofa No. 43, Bandung 40124, Jawa Barat
Telp: 7272595, 7201696; Fax: 7213572
Homepage: <https://jabar.bps.go.id>
Email: bps3200@bps.go.id